

BAB II

GAMBARAN UMUM *TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (TPPA) DAN KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM *TRANS PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (TPPA)

Gambaran umum mengenai TPPA merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman bagi para pembaca mengenai sejarah terbentuknya serta tujuan dari TPPA. Selain itu, pada bab ini juga dapat memberikan pemahaman pada pembaca mengenai peran Amerika Serikat di dalam keanggotaan TPPA.

2.1 Sejarah terbentuknya *Trans Pacific Partnership Agreement* (TPPA)

2.1.1 *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) Sebagai Cikal Bakal Terbentuknya *Trans Pacific Partnership Agreement* (TPPA)

Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 11 negara di wilayah Asia, Pasifik dan juga Amerika Latin yang memiliki tujuan utama untuk meliberalisasi perdagangan serta menciptakan dan menetapkan sejumlah aturan yang konsisten guna mempermudah segala kegiatan ekonomi dan bisnis negara anggotanya.

²⁹ Pada awalnya jumlah negara anggota TPPA adalah 12 negara, namun pada tahun 2017 Amerika Serikat mengundurkan diri dari perjanjian tersebut sehingga menyisakan 11 negara yang hingga saat ini masih menjadi anggota TPPA. Negara

²⁹ *TPPA in Brief*, diakses melalui <https://www.beehive.govt.nz/sites/default/files/TPPA-Q%26A-Oct-2015.pdf> (24/10/2018, 12:58 WIB)

yang tergabung dalam TPPA hingga saat ini adalah Selandia Baru, Singapura, Chili, Australia, Meksiko, Jepang, Brunei Darussalam, Vietnam, Kanada, Peru dan Malaysia.³⁰

Cikal bakal terbentuknya TPPA adalah pertemuan informal diantara beberapa negara anggota *Asian Pacific Economic Cooperation* (APEC) yaitu Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Chili, dan Singapura pada tahun 1990 yang pada saat itu membahas tentang rencana untuk membuat sebuah perjanjian perdagangan di Kawasan Asia Pasifik.³¹ Kelima negara yang melakukan pertemuan tersebut kemudian disebut sebagai *Pacific Five* atau 'P5'. Setelah adanya pertemuan negara-negara yang tergabung dalam P5, hanya tiga negara saja yang kemudian tertarik untuk melanjutkan rencana pembuatan perjanjian perdagangan tersebut. Tiga negara tersebut adalah Chile, Singapura dan Selandia Baru yang melakukan pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin APEC di tahun 2002 dan ketiga negara ini kemudian kerap disebut dengan *Pacific Three Closer Economic Partnership* (P3CEP).³² Negosiasi P3CEP pertama kali digelar di Singapura pada tahun 2003. Kemudian negosiasi kembali dilanjutkan pada pertengahan tahun 2004 dan terdapat empat putaran negosiasi lanjutan yang terjadi pada kurun waktu Agustus 2004 hingga April 2005.³³

³⁰ *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (TPPA-11)*, Australia Government Department of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam <https://dfat.gov.au/TRADE/AGREEMENTS/NOT-YET-IN-FORCE/TPPA-11/Pages/trans-pacific-partnership-agreement-TPPA.aspx> (07/11/2018, 00:26 WIB)

³¹ Deborah Elms & C.L. Lim, *The Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) Negotiations: Overview and Prospects*. (RSIS Working Paper), Working Paper No.232, Februari 2012, S.Rajaratnam School of International Studies Singapore, hal 1.

³² Ibid.

³³ *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement National Interest Analysis, July 2005, Prepared by the Ministry of Foreign Affairs and Trade in consultation with other government*

Semenjak negosiasi putaran kedua, Brunei Darussalam mulai mengamati dan menunjukkan ketertarikannya untuk turut bergabung dalam P3CEP. Hingga akhirnya pada tahun 2005 tepatnya saat negosiasi putaran kelima berlangsung, Brunei Darussalam mengungkapkan keinginannya untuk turut bergabung dalam negosiasi dan menjadi salah satu *founding member* dari hasil negosiasi tersebut.³⁴ Bergabungnya Brunei Darussalam dalam negosiasi tersebut kemudian membuat P3CEP dikenal sebagai *Pacific Four* atau P-4. Setelah serangkaian negosiasi dan perundingan yang telah dilakukan oleh P4, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) yang secara resmi diumumkan saat pertemuan *APEC Trade Ministers* pada Juni 2005.³⁵

TPSEP merupakan sebuah perjanjian yang sangat komprehensif dengan ruang lingkup perjanjian yang tidak hanya membahas mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi seperti liberalisasi ekonomi dan juga penghapusan tarif perdagangan diantara negara anggotanya. Lebih dari itu, TPSEP juga membahas berbagai isu penting lainnya seperti, hak kekayaan intelektual, isu ketenagakerjaan dan juga isu lingkungan. Terdapat 20 pasal dengan dua *Memoranda of Understanding (MoU)* yang membahas mengenai kerjasama dalam hal ketenagakerjaan dan lingkungan dalam perjanjian ini. Kedua *MoU* ini bersifat terpisah dari perjanjian TPSEP, namun apabila salah satu negara anggota

departments, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, diakses melalui <https://www.mfat.govt.nz/assets/FTAs-agreements-in-force/P4/transpacific-sepa-nia.pdf>, hal 5 (13/10/2018, 17:41 WIB)

³⁴ Ibid.

³⁵ Deborah Elms & C.L Lim, *Op. Cit*

memutuskan untuk mengundurkan diri dari salah satu diantara tiga kesepakatan yang ada, maka secara otomatis negara tersebut juga mengundurkan diri dari dua kesepakatan yang lainnya.³⁶

Sebelum resmi berlaku, perjanjian ini terlebih dahulu harus diratifikasi oleh masing-masing negara anggotanya. Proses ratifikasi oleh negara anggota TPSEP ini berbeda-beda, Chili, Selandia Baru dan Singapura terlebih dahulu meratifikasi perjanjian ini pada 18 Juli 2005. Sementara Brunei Darussalam melakukan ratifikasi perjanjian pada 2 Agustus 2005.³⁷ Perjanjian TPSEP mulai secara resmi berlaku pada tahun 2006, ketika masing-masing negara anggotanya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Memiliki anggota yang hanya berjumlah empat negara, membuat TPSEP dijadikan sebuah contoh bahwa sebuah perjanjian perdagangan bebas dapat bermula dari sebuah perjanjian kecil yang nantinya dapat berkembang menjadi lebih besar dengan cara penambahan jumlah anggota melalui klausul aksesi.

Klausul aksesi dalam perjanjian TPSEP tercantum dalam pasal 20 ayat 6 yang menyatakan bahwa aksesi atau penambahan anggota dalam perjanjian ini terbuka bagi negara anggota APEC lainnya atau negara-negara lain yang ingin bergabung dalam perjanjian tersebut.³⁸ Adanya klausul aksesi dalam TPSEP

³⁶ Deborah Elms & C.L Lim, *Op. Cit*

³⁷ Meredith K. Lewis, *The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep's Clothing?*, Boston College International and Comparative Law Review, Vol, 34, No 1 (2011), diakses dalam <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol34/iss1/3>, hal 31 (17/10/2018, 06:58 WIB)

³⁸ Deborah Elms, *Getting from Here to There: Stitching Together Goods Agreements in the Trans-Pacific Partnership (TPPA) Agreement*, Working Paper No. 235, April 2012, S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, hal 2-3.

kemudian memberikan celah bagi Amerika Serikat untuk turut bergabung menjadi negara anggota dalam perjanjian ini.

2.1.2 Bergabungnya Amerika Serikat dalam TPSEP dan Terbentuknya *Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)*

Negara pertama yang menjadi anggota baru dalam perjanjian TPSEP semenjak mulai resmi berlaku di tahun 2006 adalah Amerika Serikat. Pada tahun 2008 dibawah pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika Serikat menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dalam TPSEP. Ketertarikan Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPSEP disampaikan oleh Susan Schwab selaku pejabat *United State Trade Representatives* (USTR) melalui pernyataannya ketika mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara P4 yaitu:

“....The United States is pleased to stand with this group of like minded countries, whose vision for trade liberalization and Trans-Pacific economic integration we share. We are particularly interested in this high-standart agreement potentially serving as a vehicle for advancing trade and investment liberalization and integration across the Trans-Pacific region and perhaps beyond. Ultimately, the objective is to expand the membership of the Agreement to other nations that share our vision of free and fair trade...”³⁹

Namun, keinginan Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPSEP harus tertunda dikarenakan adanya proses pergantian presiden. Posisi sebagai presiden Amerika Serikat kemudian digantikan oleh Barrack Obama. Sama halnya seperti George W. Bush, Presiden Barrack Obama juga berkomitmen untuk bergabung

³⁹ Schwab Statement on launch of the U.S. Negotiations to join the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, Office of the United States Trade Representative, diakses dalam <https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement> (08/11/2018, 07:24 WIB)

dalam TPSEP dengan tujuan untuk membentuk sebuah kesepakatan regional yang memiliki basis keanggotaan yang luas dan menjadi sebuah perjanjian perdagangan dengan standar yang tinggi abad 21.⁴⁰ Selain itu, dengan bergabung dalam TPSEP menjadi sebuah permulaan untuk Amerika Serikat kembali terlibat dalam kerja sama regional di Kawasan Asia Pasifik setelah sebelumnya lama tidak ikut serta. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Presiden Barrack Obama melalui rangkaian pidatonya saat berada di Tokyo pada November 2009:

“....The growth of multilateral organizations can advance the security and prosperity of this region. I know that the United States has been disengaged from these organizations in recent years. So let me be clear: those days have passed. As an Asia Pacific nation, the United States expects to be involved in the discussions that shape the future of this region and to participate fully in appropriate organizations as they are established and evolve.”⁴¹

Dapat dikatakan dengan bergabungnya Amerika Serikat dalam perjanjian ini, TPSEP dapat lebih dikenal oleh negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk turut bergabung dalam TPSEP.⁴² Beberapa negara yang mengikuti jejak Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPSEP diantaranya adalah Australia dan Peru. Sementara Vietnam menyusul dengan mengajukan diri sebagai observer dalam perjanjian, sebelum akhirnya benar-benar bergabung.⁴³

⁴⁰ Ian F. Ferguson & Bruce Vaughn, *The Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*, Congressional Research Service, diakses dalam <http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R40502.pdf> (10/11/2018, 08:23 WIB)

⁴¹ Ibid.

⁴² Deborah Elms, Op. Cit., hal 7

⁴³ Ibid.

Bertambahnya jumlah anggota dalam perjanjian tersebut menjadikan P4 berubah menjadi P7. Hal ini lalu membuat nama perjanjian kerjasama ini berganti menjadi *Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)*. Penggantian nama ini dilakukan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengakomodir segala kepentingan negara-negara anggota yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah negara anggota yang bergabung dalam perjanjian kerjasama ini.⁴⁴ Setelah melakukan pergantian nama, selanjutnya para negara anggota melakukan negosiasi dalam beberapa putaran perundingan guna membicarakan tentang substansi, aturan maupun tujuan dari adanya perjanjian kerjasama ini.

Perundingan TPPA sebenarnya telah lama dimulai. Tepatnya ketika Amerika Serikat menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam perjanjian kerjasama ini pada tahun 2008. Namun, karena terkendala adanya proses pergantian presiden, perundingan secara resmi baru dimulai pada Maret 2010 di Melbourne, Australia.⁴⁵ Perundingan pertama ini diikuti oleh seluruh negara anggota yang tergabung dalam P7 yaitu, Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Peru, Selandia Baru dan Singapura serta Vietnam yang saat itu berpartisipasi dalam perundingan sebagai *observer*.⁴⁶ Hal yang dibahas dalam perundingan pertama ini adalah

⁴⁴ T. Rajamoorthy, The Origins and Evolution of the Trans Pacific Partnership (TPP), Global Research, diakses dalam <https://www.globalresearch.ca/the-origins-and-evolution-of-the-trans-pacific-partnership-tpp/5357495> (10/11/2018, 08:48 WIB)

⁴⁵ Ian F Ferguson & Bruce Vaughn, *The Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*, Congressional Research Service, diakses dalam <http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R40502.pdf> (10/11/2018, 09:08 WIB)

⁴⁶ Ibid.

mengenai masalah keanggotaan, tujuan serta skala dan cakupan dari perjanjian kerjasama ini.⁴⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, TPPA mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya negara-negara yang akhirnya turut bergabung dalam perjanjian kerjasama ini. Pada bulan Oktober tahun 2010, Malaysia memutuskan untuk bergabung. Selanjutnya pada November 2010, Vietnam yang sebelumnya sebatas menjadi *observer* dalam perundingan akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota sepenuhnya dalam perjanjian kerjasama ini. Kemudian diikuti dengan Kanada yang mengajukan diri untuk bergabung dalam perjanjian pada tahun 2012 dan disusul oleh Meksiko setelahnya. Negara terakhir yang bergabung menjadi anggota dalam TPPA adalah Jepang yang secara resmi bergabung pada Juli 2013.⁴⁸

Proses negosiasi TPPA memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu lima tahun yang terjadi mulai dari tahun 2010 hingga 2015. Terdapat 19 putaran negosiasi yang dilakukan sebelum akhirnya para negara anggota mencapai kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama ini. Seluruh proses perundingan yang ada membahas mengenai berbagai hal terkait isu-isu yang menjadi fokus utama dari perjanjian kerjasama ini seperti ketentuan perdagangan dan investasi, lingkungan, sosial budaya, ketenagakerjaan, kesehatan, hak kekayaan intelektual dan pembangunan serta mekanisme perjanjian yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Seftia Novita Sari Majelis, 2015, *Latar Belakang Jepang Bergabung dalam Keanggotaan Trans Pacific Partnership*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, hal 28.

Dimana, hal-hal yang dibahas dalam berbagai putaran negosiasi tersebut merupakan representasi dari kepentingan nasional para negara anggota.

Selanjutnya setelah serangkaian babak negosiasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa pertemuan lanjutan yang diselenggarakan oleh para negara anggota TPPA diantaranya yaitu, *Chief Negotiators Meeting* dan *Ministers Meeting* yang diadakan secara tertutup pada rentang waktu tahun 2014 hingga 2015.⁴⁹ Pertemuan lanjutan ini memiliki pokok pembahasan mengenai membuat TPPA menjadi sebuah perjanjian abad 21 (*21st Century Agreement*) yang dapat mengakomodir dan memenuhi kepentingan para negara anggotanya serta lebih lanjut menyempurnakan aturan-aturan mengenai hal-hal yang telah dibahas dalam babak negosiasi sebelumnya.⁵⁰

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya pada 5 Oktober 2015 negara anggota TPPA mengumumkan bahwa proses negosiasi yang mereka lakukan telah selesai.⁵¹ Selanjutnya pada 4 Februari 2016, para negara anggota TPPA melakukan penandatanganan perjanjian secara resmi di Auckland, Selandia Baru yang kemudian diikuti dengan langkah konsolidasi dan penetapan peraturan untuk legalisasi TPPA dalam negeri.⁵² Perjanjian kerjasama ini baru dapat diberlakukan apabila telah diratifikasi oleh badan legislative masing-masing negara anggota TPPA.

⁴⁹ <https://ustr.gov/callout/TPPA-negotiation-updates>

⁵⁰ Alhamdu Ramadhan, 2017, Analisa Keputusan Selandia Baru Bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 41.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

2.2 Tujuan *Trans Pacific Partnership Agreement* (TPPA)

Bermula dari sebuah perjanjian kerjasama dibidang perdagangan, TPPA muncul sebagai penerus atau wujud perluasan dari TPSEP. Sebelum berganti menjadi TPPA, TPSEP yang saat itu hanya terdiri dari 4 negara anggota memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang perdagangan di Kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan bertambahnya jumlah negara yang turut bergabung didalamnya, TPSEP pun berganti nama menjadi TPPA. Bertambahnya anggota hingga memiliki jumlah anggota sebanyak 12 negara, tentunya memberikan dampak berupa perubahan dan perluasan pada tujuan TPPA yang kemudian tidak hanya berfokus pada sektor perdagangan saja untuk mengakomodir kepentingan para negara-negara anggotanya.

Dalam *preamble* atau pembukaan dokumen perjanjian ini, disebutkan bahwa tujuan dari TPPA adalah untuk menciptakan sebuah perjanjian regional yang komprehensif. Hal ini memiliki arti bahwa TPPA akan menjadi sebuah perjanjian regional dengan cakupan yang luas. Tidak hanya berfokus dalam bidang ekonomi, namun TPPA juga mengatur mengenai permasalahan dalam berbagai bidang lainnya seperti politik, sosial, lingkungan, ketenagakerjaan dan budaya negara anggotanya. Luasnya cakupan yang dimiliki oleh TPPA menjadikannya sebagai 21st century agreement atau perjanjian abad ke 21 yang mana artinya TPPA dianggap dapat menjadi jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh para negara anggotanya.

Seperti tujuan awalnya, TPPA dibentuk untuk menjadi sebuah perjanjian perdagangan di Kawasan Asia Pasifik. TPPA bertujuan untuk mempromosikan liberalisasi investasi perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan serta memperbaiki kondisi ekonomi negara anggotanya. Untuk itu, TPPA digunakan untuk mendorong terbukanya akses dari negara-negara lain sehingga dapat meningkatkan integrasi perekonomian regional dan menciptakan landasan *Free Trade Area of Asia Pacific*. TPPA berusaha untuk memperluas perdagangan dan menjadi katalis atau penghubung untuk memperluas kerjasama internasional antara negara-negara anggotanya dengan negara lain.

Upaya peningkatan perekonomian juga dilakukan dengan cara membuka peluang terciptanya kesempatan baru bagi para pekerja maupun kalangan pebisnis dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan bagi negara anggotanya serta memperkuat *regional supply chains*. TPPA selanjutnya memberikan jaminan pada para pelaku usaha baik eksportir dan importir dan memberikan dukungan untuk meningkatkan perdagangan regional melalui cara mempromosikan regional prosedur yang efisien dan transparan sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku bisnis dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam skala yang lebih kecil, TPPA memberikan dukungannya pada pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah melalui cara peningkatan kemampuan para pelaku usaha tersebut untuk berpartisipasi dalam penerapan TPPA. TPPA berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang saling menguntungkan dalam bidang perdagangan dan investasi. Tidak hanya

memberikan perhatian pada para pebisnis, TPPA juga memberikan perhatiannya pada masalah ketenagakerjaan. TPPA berupaya untuk melindungi dan mengakui hak-hak para pekerja serta meningkatkan kondisi bekerja dengan memperkuat kerjasama antar negara anggota dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam bidang sosial, tujuan dibentuknya TPPA adalah sebagai sebuah sarana mempererat ikatan persahabatan dan kerjasama yang telah terjalin di antara negara anggota. Memiliki negara anggota dengan latar belakang yang berbeda membuat adanya TPPA juga bertujuan untuk memperkaya identitas budaya dalam Kawasan Asia-Pasifik dengan cara saling memahami perbedaan kultural atau budaya masing-masing negara anggotanya. Selain itu, TPPA juga mendukung adanya perlindungan lingkungan atau *high level environmental protection* disetiap negara anggotanya. Sementara dalam bidang politik, TPPA memiliki tujuan untuk mempromosikan transparansi dan *good governance* guna meminimalisir adanya kasus korupsi yang timbul dalam kegiatan perdagangan maupun investasi.

Memiliki 12 negara anggota tentunya terdapat perbedaan dalam berbagai bidang seperti, kondisi ekonomi maupun politik antara satu negara dengan negara yang lain. Oleh karena itu, TPPA menekankan agar para negara anggotanya dapat saling mengenali perbedaan yang ada. Meskipun memiliki kondisi ekonomi yang berbeda, setiap negara anggotanya memiliki peran dan hak yang sama dalam perjanjian tersebut dan masing-masing negara anggota memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan berbagai peraturan dalam negeri tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

2.3 Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam TPPA

Bergabungnya suatu negara dalam sebuah perjanjian kerjasama seringkali dilandasi dengan alasan untuk memenuhi kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Begitu pula bergabungnya Amerika Serikat menjadi negara anggota TPPA tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Kepentingan nasional Amerika Serikat yang ingin dicapai melalui TPPA dapat diketahui melalui pernyataan pers Susan Schwab pada saat memberitahukan ketertarikan Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPSEP, yaitu :⁵³

“We make this announcement here in New York, the U.S. financial center, at a time when attention is focused on the challenges confronting the financial markets and our economy. The administration is taking extraordinary measures to address these challenges and will continue to act to strengthen and stabilize the the strengtshs of our economy....”

“Today, I want to discuss the United States participation in the Trans Pacific Partnership Agreement, and our long-term vision for regional, plurilateral and multilateral agreement that promise more than lowest common denominator outcomes. This initiative also will help strengthen the United States competitiveness and generate growth and prosperity in the years ahead. Robust international trade is crucial to health of the U.S. economy, particulary during the uncertain times we are experiencing. With our good, agriculture, and services exports growing steadily....”

“We need to ensure that our trade will continue to expand so that it can contribute to U.S. economic growth in the future. Strengthening our economic ties to the Trans Pacific region is vital to achieving this goal because of the economic significance of this region now and in the future. With its large and growing markets and robust

⁵³ Schwab Statement on launch of the U.S. Negotiations to join the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, Office of the United States Trade Representative, diakses dalam <https://ustr.gov/schwab-statement-launch-us-negotiations-join-trans-pacific-strategic-economic-partnership-agreement> (08/11/2018, 07:24 WIB)

economic growth, it is clear that further strengthening our ties to this region should be a priority.”

Melalui pernyataan pers tersebut dapat diketahui setidaknya terdapat dua kepentingan nasional Amerika Serikat bergabung dalam TPPA yang secara garis besar dapat dikategorikan dalam kepentingan dibidang ekonomi dan politik.

Dalam hal kepentingan ekonomi, bergabungnya Amerika Serikat dalam TPPA memiliki tujuan untuk memperluas pasar perdagangannya serta menstabilkan kondisi ekonomi negara pasca terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat ditahun 2008.⁵⁴ Amerika Serikat melihat bahwa TPPA menjadi suatu perjanjian kerjasama yang sangat berpotensi untuk dapat memperluas pasar perdagangannya di sektor ekspor. Adanya TPPA akan menghapus lebih dari 18.000 jenis pajak dan mengurangi tarif impor diseluruh negara anggotanya.⁵⁵ Sehingga produk-produk andalan yang kerap diekspor oleh Amerika Serikat dapat lebih mudah masuk dalam pasar negara-negara anggota TPPA yang sebelumnya terbebani pajak dan biaya impor yang cukup tinggi.

Beberapa produk yang menjadi produk ekspor andalan Amerika Serikat diantaranya adalah produk manufaktur yang terdiri dari produk otomotif, produk teknologi komunikasi dan informasi, serta berbagai produk dari sektor pertanian. Pada produk otomotif, dengan berlakunya TPPA akan menghapuskan pajak impor sebesar 70 persen pada produk otomotif yang diproduksi oleh Amerika Serikat.⁵⁶

⁵⁴ Seftia, *Op.Cit.* hal 28

⁵⁵ *The Trans Pacific Partnership*, diakses dalam <https://ustr.gov/tpp/> (22/11/2018 08:48)

⁵⁶ *The Financial Crisis in the US : Key events, causes and responses*, diakses dalam http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/US_Financial_Crisis.pdf (23/11/2018, 11:47 WIB)

Tentunya hal ini akan menjadi langkah yang sangat baik untuk perkembangan industri otomotif Amerika Serikat agar bisa memasarkan produknya secara lebih luas dan berkompetisi dengan produk serupa dari negara-negara lain.

Seperti yang telah disebutkan diatas, selain untuk memperluas pasar perdagangannya Amerika Serikat juga memiliki kepentingan lain ketika bergabung dalam TPPA yaitu, menstabilkan kembali kondisi ekonomi negara pasca terjadinya krisis finansial. Krisis finansial yang melanda Amerika Serikat terjadi mulai dari pertengahan tahun 2007 dan mengalami puncaknya pada September 2008. Krisis finansial ini merupakan akibat dari adanya kasus *subprime mortgage* (kredit perumahan bermutu rendah) yang merupakan sebuah efek domino ketika saham-saham perusahaan *dotcom* di Amerika Serikat kolaps yang menyebabkan perusahaan-perusahaan penerbit saham tersebut tidak mampu membayar pinjaman ke bank pada tahun 2000 hingga 2001.⁵⁷ Akibatnya Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) menurunkan suku bunga menjadi rendah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan developer dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk membangun rumah-rumah yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki jaminan keuangan yang memadai.

Pada tahun 2004 terdapat perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang menjadi lebih ketat sehingga menyebabkan naiknya suku bunga yang terjadi hingga tahun 2006. Naiknya suku bunga ini akhirnya menyebabkan banyak debitur yang saat itu berasal dari pasar perumahan mengalami gagal bayar. Kredit

⁵⁷ Ibid.

perumahan dengan mutu rendah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah akhirnya mengalami kemacetan dalam pembayaran cicilan hutangnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya bunga kredit, sehingga banyak pemilik rumah yang tidak kuat lagi membayar cicilan dan akhirnya menyerahkan rumahnya untuk disita oleh bank. Akibat dari adanya kasus *subprime mortgage* ini berdampak pada terjadinya krisis finansial yang ditandai dengan bangkrutnya sejumlah perusahaan lembaga keuangan internasional seperti, Lehman Brothers, AIG (*American International Group*), Fannie Mae, Freddie Mac yang terjadi pada tahun 2008.⁵⁸ Adanya krisis finansial ini menyebabkan tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat menjadi 6,8% yang sebelumnya di tahun 2004 adalah 4,4% serta tingkat inflasi yang meningkat menjadi 5,6% yang sebelumnya adalah 2,1%.⁵⁹

Upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menghadapi krisis yang tengah terjadi diantaranya adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan moneter, seperti menurunkan suku bunga, menyelamatkan bank-bank besar dari kebangkrutan dan juga menyuntikkan dana ke pasar modal dengan harapan dapat menstabilkan keadaan ekonomi.⁶⁰ Namun krisis ekonomi yang terjadi juga mengakibatkan naiknya angka pengangguran di Amerika Serikat. Bergabungnya Amerika Serikat dalam TPPA diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari

⁵⁸ Franklin Allen, *An Overview of the Crisis*, diakses dalam <http://apps.eui.eu/Personal/Carletti/IRF-Overview-Allen-Carletti-26Nov09-final.pdf> (22/11/2018 10:27 WIB)

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Andri, 2013, *Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans Pacific Partnership Periode 2011-2013*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24085/3/ANDRI%20-%20HI%20-%20FISIP%20-%20109083000032_NoRestriction.pdf

permasalahan bertambahnya angka pengangguran dengan membuka peluang serta memberikan lapangan pekerjaan yang luas pada rakyat Amerika Serikat.

Dalam kepentingan politik, Amerika Serikat menggunakan TPPA sebagai instrumen dalam kebijakan “*Pivot to Asia*” atau “*Rebalancing towards Asia*” yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama. Pergantian presiden turut memberikan perubahan pada arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Apabila pada pemerintahan Presiden George W. Bush lebih berfokus pada perang dan konflik yang terjadi di Timur Tengah, maka pada pemerintahan Presiden Barrack Obama lebih berfokus untuk menjalin hubungan baik antara Amerika Serikat dengan negara-negara aliansinya di Kawasan Asia-Pasifik yang sempat terabaikan sebelumnya.

“*Pivot to Asia*” atau “*Rebalancing toward Asia*” merupakan sebuah strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam rangka untuk mempertahankan hegemoni Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. Strategi kebijakan politik luar negeri ini masuk dalam *National Security Strategic* Amerika Serikat dan mulai dijalankan pada akhir tahun 2011.⁶¹ Melalui kebijakan ini, berarti Amerika Serikat berfokus untuk menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang terutama bidang ekonomi dengan negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dinilai sebagai salah satu alasan munculnya kebijakan ini. Pada tahun 2010, GDP Tiongkok mengalami

⁶¹ Colonel Chris Mills, *The United States' Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon*, diakses dalam <http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/R23177605-1.pdf> (23/11/2018, 08:59 WIB)

pertumbuhan sebesar 10,3% dari tahun sebelumnya.⁶² Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekspor yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain dari kegiatan ekspor yang meningkat, Tiongkok juga giat menarik investor dan aktif melakukan investasi di dalam maupun luar negeri.⁶³ Peningkatan pertumbuhan GDP Tiongkok juga menjadi suatu bukti kuatnya ekonomi Tiongkok dalam menghadapi krisis finansial global yang diakibatkan oleh kasus *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang memberikan efek secara global. Sedangkan pada tahun yang sama, Amerika Serikat hanya mengalami peningkatan pertumbuhan GDP sebesar 2,8%.⁶⁴ Hal ini disebabkan oleh belum pulihnya kondisi ekonomi negara pasca terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang meningkat semakin signifikan menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat dalam perekonomian global. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara terkuat dalam perekonomian global. Oleh sebab itu, untuk memperkuat pengaruhnya terutama di Kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat menggunakan TPPA sebagai sebuah instrument untuk menjalankan kebijakan “*Pivot to Asia*” atau “*Rebalancing toward Asia*”.

⁶² Meghnanda Alidyan K, *Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Singapura, India, dan China*, diakses dalam <http://eprints.upnjatim.ac.id/4444/1/8. Halaman 31-38%2C Megahnanda A.K..pdf> (23/11/2018, 09:11WIB)

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

2.4 Pro dan Kontra *Trans Pacific Partnership Agreement* (TPPA) di Amerika Serikat

Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) merupakan salah satu agenda terbesar dalam pemerintahan Presiden Barrack Obama. Ketertarikan Presiden Barrack Obama untuk bergabung dalam TPPA didasari oleh upaya pemenuhan kepentingan nasional Amerika Serikat melalui TPPA. Perjanjian kerjasama ini dinilai sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat pada waktu itu. Melalui TPPA, Presiden Barrack Obama berharap dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi rakyat Amerika Serikat dan menstabilkan kondisi keuangan negara pasca terjadinya krisis. Tidak hanya itu, TPPA juga digunakan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah instrument untuk memperkuat hegemoninya di Kawasan Asia Pasifik untuk membendung pengaruh Tiongkok.

Setelah melakukan serangkaian negosiasi selama kurang lebih tujuh tahun, akhirnya negosiasi TPPA mencapai kesepakatan dan disahkan secara resmi melalui penandatanganan dokumen oleh para kepala negara anggota pada 4 Februari 2016. Dalam naskah perjanjian TPPA, tepatnya pada pasal 30.5 yang mengatur tentang pemberlakuan TPPA disebutkan bahwa agar dapat secara resmi diberlakukan sepenuhnya, TPPA memerlukan ratifikasi badan legislative dari setidaknya 6 negara anggota yang mewakili 85% jumlah GDP keseluruhan.⁶⁵ Amerika Serikat masuk dalam 6 negara yang diharuskan melakukan ratifikasi oleh badan legislative negaranya. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara anggota dengan

⁶⁵ Unites State Trade Representative, "*TPP Final Provisions*", diakses dalam <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Final-Provisions.pdf> (30/11/2018, 08:51 WIB)

jumlah GDP terbesar yaitu mencakup 65% dari jumlah GDP keseluruhan negara anggota TPPA.⁶⁶

Proses ratifikasi TPPA oleh badan legislative Amerika Serikat dilakukan oleh Kongres melalui *Trade Promotion Authority* (TPA) atau yang juga dikenal dengan metode *fast track*.⁶⁷ *Trade Promotion Authority* (TPA) atau metode *fast track* adalah proses yang memungkinkan adanya pemberian persetujuan dan pengimplementasian sebuah perjanjian perdagangan internasional melalui undang-undang yang diberikan oleh Kongres pada Presiden dalam periode yang terbatas untuk dipertimbangkan secara lebih cepat melalui prosedur legislative yang ada.⁶⁸ Proses ini diperlukan ketika perjanjian perdagangan internasional yang akan dilakukan memberikan dampak berupa adanya perubahan hukum atau undang-undang yang diperlukan untuk mengimplementasikannya.

Melalui TPA, Kongres memiliki wewenang untuk mewajibkan Presiden memberikan laporan khusus yang terdiri atas: laporan tentang dampak lingkungan, laporan kajian ketenagakerjaan, laporan analisis perburuhan baik di dalam Amerika Serikat maupun di negara yang menjadi mitra dagang internasional, laporan kesiapan infrastruktur, laporan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dan laporan analisis dampak perjanjian bagi negara-negara bagian Amerika Serikat yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan

⁶⁶ Ian F. Ferguson & Christopher M. Davis, *Trade Promotion Authority (TPA) : Frequently Asked Questions*, diakses dalam <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf> (30/11/2018, 11:24 WIB)

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

untuk meratifikasi perjanjian tersebut.⁶⁹ Selain itu, Kongres juga memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Senat selaku wakil dari suara rakyat.

Proses ratifikasi dalam Kongres Amerika Serikat diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pandangan pihak yang pro dan kontra terhadap TPPA dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan oleh Kongres dalam meratifikasi perjanjian ini. Bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk bergabung dalam TPPA, perjanjian ini memberikan banyak keuntungan bagi Amerika Serikat karena sesuai dengan kepentingan nasional negara dan memiliki potensi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja bagi rakyat Amerika yang telah menjadi fokus utama dalam pemerintahan Barrack Obama. Tidak hanya menjanjikan peningkatan peluang kerja yang lebih luas, adanya TPPA juga akan menciptakan persaingan kerja yang lebih sehat bagi para pekerja Amerika Serikat agar dapat bersaing secara adil dengan para pekerja yang berasal dari negara anggota TPPA lainnya. Melalui TPPA, diharapkan Amerika Serikat dapat memperluas pasar dagangannya ke negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yang secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

Keuntungan yang diperoleh Amerika Serikat dalam TPPA tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga dalam bidang politik dan keamanan. Bergabungnya Amerika Serikat dalam TPPA akan memperkuat hegemoni Amerika

⁶⁹ Ibid

Serikat di negara-negara Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, secara tidak langsung perjanjian ini akan memperkuat aliansi dan kemitraan regional serta membantu meningkatkan keamanan nasional Amerika Serikat.⁷⁰

Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh *US International Trade Commission* diketahui bahwa apabila Amerika Serikat memutuskan untuk tetap bergabung dalam TPPA, terdapat kemungkinan adanya pengaruh positif yang akan didapatkan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.⁷¹ Diproyeksikan, dalam waktu 15 tahun pasca diberlakukannya TPPA atau tepatnya pada tahun 2032 pendapatan riil tahunan Amerika Serikat akan mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen menjadi \$57,3 Miliar. Sedangkan PDB akan mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen yaitu menjadi \$42,7 Miliar. Serta terjadi peningkatan pada angka tersedianya lapangan pekerjaan sebesar 0,07 persen atau sejumlah 128.000. Peningkatan juga terjadi di sektor ekspor dan impor dimana masing-masing akan mengalami kenaikan sebesar \$34,6 Miliar atau sebesar 18,7 persen untuk ekspor dan \$23,4 Miliar atau 10,4 persen untuk impor. Tidak hanya itu dalam sektor pertanian dan pangan akan mengalami peningkatan sebesar \$10 Miliar atau 0,5 persen dan sektor jasa sebesar \$42,3 Miliar atau 0,1 persen. Sedangkan dalam sektor manufaktur, sumber daya alam dan energi akan mengalami penurunan sebesar 0,1 persen atau senilai \$10,8 Miliar apabila Amerika Serikat tetap bergabung dalam TPPA.

⁷⁰ Ian F Fergusson & Brock R. Williams, *The Trans Pacific Partnership : Key Provisions and Issues For Congress* diakses dalam <https://fas.org/sgp/crs/row/R44489.pdf> (30/11/2018, 17:36 WIB)

⁷¹ United States International Trade Commission, *Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and Specific Industry*.

Meskipun diproyeksikan memberikan keuntungan dalam beberapa bidang, namun tetap saja ada pihak-pihak yang tidak menyetujui bergabungnya Amerika Serikat dalam TPPA ini. Perjanjian kerjasama ini dinilai justru akan meningkatkan peluang bertambahnya angka kehilangan pekerjaan yang lebih besar bagi rakyat Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan dengan adanya TPPA tidak akan menghentikan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk melakukan produksinya di negara-negara yang memiliki upah buruh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat seperti Vietnam dan Malaysia.⁷² Selain itu pihak yang menyatakan tidak setuju dengan masuknya Amerika Serikat dalam TPPA juga beranggapan bahwa perjanjian ini akan membatasi kemampuan pemerintah untuk membuat peraturan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keamanan pangan, dan lingkungan.⁷³



Gambar 2.1 Aksi protes yang rakyat Amerika Serikat menolak ratifikasi TPPA

⁷² John A. Powell, dkk, *Trans Pacific Partnership Corporations before people and democracy* diakses dalam https://haasinstitute.berkeley.edu/sites/default/files/haasinstitute_tpp_updated_republishedmay2016_0.pdf (30/11/2018, 19:38 WIB)

⁷³ Fergusson, *Op. Cit*

Sumber: “TPP Signing Sparks Dozens of Protest Across US Over Biggest Trade Pact” dalam <https://www.rt.com/usa/331356-tpp-signing-protests-usa/>

Dalam dokumen perjanjian TPPA diatur sebuah bab yang membahas tentang investasi dimana terdapat sebuah aturan bahwa investor asing berhak untuk menuntut pemerintah dalam arbitrase internasional swasta ketika mereka merasa hak properti yang baru mereka buat dilanggar oleh negara yang bersangkutan.⁷⁴ Peraturan ini lebih dikenal dengan sebutan *investor-state dispute settlement* atau ISDS. Adanya peraturan ini, banyak membuat berbagai kalangan khususnya para pekerja kelas menengah beranggapan bahwa TPPA adalah sebuah perjanjian yang tidak memihak para pekerja namun syarat dengan kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Serangkaian aksi penolakan dilakukan oleh petani, persatuan buruh, pakar ekonomi, perawat dan berbagai profesi lainnya untuk menentang diratifikasinya TPPA oleh Kongres.⁷⁵

Kekurangan TPPA yang dinilai akan memberikan dampak buruk bagi Amerika Serikat adalah tidak adanya bab atau aturan yang mengatur tentang manipulasi mata uang yang dilakukan oleh beberapa negara anggotanya. Praktek manipulasi mata uang yang dilakukan oleh beberapa negara anggota TPPA seperti Jepang, Singapura dan juga Malaysia telah memberikan dampak buruk berupa terjadinya defisit pada sektor perdagangan Amerika Serikat yang berujung pada

⁷⁴ Joseph Stiglitz, *Beware of TPP's Investor-State Dispute Settlement Provision* diakses dalam <http://rooseveltinstitute.org/beware-tpps-investor-state-dispute-settlement-provision/> (3/12/2018, 08:04 WIB)

⁷⁵ *The TPP wasn't killed by Donald Trump-our protests worked* diakses dalam <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/tpp-protests-mass-opposition-worked-trump-presidency> (3/12/2018, 08:28 WIB)

hilangnya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2015 defisit perdagangan barang Amerika Serikat sebesar \$177,9 Miliar dengan 11 negara anggota TPPA lainnya mengurangi perolehan PDB Amerika Serikat sebesar 1,6 persen atau senilai \$284,6 Miliar dan juga menghapus setidaknya 2 juta lapangan pekerjaan.⁷⁶ Tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur praktek manipulasi mata uang yang dilakukan oleh beberapa negara anggotanya, dikhawatirkan dapat memperburuk defisit perdagangan Amerika Serikat nantinya dan berpotensi meningkatkan angka kehilangan pekerjaan yang lebih banyak

2.5. Keluarnya Amerika Serikat dari TPPA

Resmi menjadi presiden Amerika Serikat ke 45, Donald Trump tidak membutuhkan waktu lama untuk segera menepati janji-janjinya semasa kampanye. Pada hari pertamanya menjabat sebagai Presiden, Donald Trump melakukan penandatanganan *executive actions* berupa *presidential memorandum* yang menyatakan bahwa Amerika Serikat secara resmi keluar dari keanggotaan TPPA. Dokumen tersebut selanjutnya diterbitkan dalam *Federal Register*. Dalam dokumen *presidential memorandum* tersebut, Donald Trump memaparkan alasannya untuk menarik Amerika Serikat dari keanggotaan TPPA. Donald Trump memaparkan bahwa keputusannya untuk menarik Amerika Serikat keluar dari TPPA merupakan sebuah kebijakan yang digunakannya untuk membela hak rakyat Amerika Serikat

⁷⁶ Robert E. Scott & Elizabeth Glass, *Trans-Pacific Partnership, Currency manipulation, trade, and jobs*, Economic Policy Institute diakses dalam <https://www.epi.org/publication/trans-pacific-partnership-currency-manipulation-trade-and-jobs/#epi-toc-8> (08/12/2018 11:17 WIB)

agar memiliki kesepakatan ekonomi yang lebih baik, menguntungkan dan juga adil terutama bagi rakyatnya yang berasal dari kalangan pekerja.

Keputusan Donald Trump ini tentunya menuai banyak kontroversi terutama dari negara-negara anggota TPPA lainnya. Keluarnya Amerika Serikat, membuat TPPA tidak dapat secara resmi diberlakukan. Hal ini dikarenakan untuk dapat membuat TPPA secara resmi diberlakukan diseluruh negara anggotanya, TPPA memerlukan ratifikasi badan legislative dari setidaknya 6 negara anggota yang mewakili 85% jumlah GDP keseluruhan.⁷⁷ Sedangkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang diwajibkan untuk melakukan ratifikasi oleh badan legislative agar TPPA dapat secara resmi diberlakukan. Selain itu keluarnya Amerika Serikat membuat TPPA menjadi tidak berarti, karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara penginisiasi terbentuknya TPPA dan juga dapat dikatakan sebagai negara pemimpin dalam perjanjian perdagangan tersebut.

Sebagai pengganti dari TPPA, Donald Trump menyatakan dalam dokumen *presidential memorandum*-nya akan menjalin hubungan dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan bagi rakyat Amerika Serikat. Cara ini dipilih Donald Trump untuk meminimalisir kecurangan yang akan memberikan kerugian bagi rakyat Amerika Serikat khususnya para pekerja karena kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang seringkali ada dalam sebuah kesepakatan-kesepakatan seperti TPPA. Selain itu dengan menjalin hubungan kerjasama secara bilateral, Donald Trump bertujuan untuk mempromosikan industri

⁷⁷ Unites State Trade Representative, “*TPP Final Provisions*”, diakses dalam <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Final-Provisions.pdf> (30/11/2018, 08:51 WIB)

Amerika Serikat dan juga meningkatkan standar upah bagi para pekerja. Tidak hanya menarik diri dari TPPA, namun Donald Trump juga mengancam akan menarik Amerika Serikat dari NAFTA apabila kesepakatan tersebut tidak berpihak pada kalangan pekerja Amerika Serikat.

